

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>7</sup> Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.<sup>8</sup> Jadi dapat diartikan jika efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.<sup>9</sup> Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah

---

<sup>7</sup>E- journal, <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. ( Diakses pada 20 juli 2019)

<sup>8</sup>Ibid.,

<sup>9</sup>Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang, UMM Press, 2004), Hlm. 294.

efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.<sup>11</sup> Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

## 2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

---

<sup>10</sup>Asnawi. 2013,*Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota* , Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6

<sup>11</sup>E- journal, <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. (Diakses pada 20 Juli 2019)

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Menurut Sudarwan Danim dalam bukunya “*Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*” menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- c. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- d. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektivitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada efektivitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta

<sup>12</sup>Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, Hlm. 294

<sup>13</sup>Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) hlm.14

intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada efektivitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>14</sup>

### **2. Sumber dana desa**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah diamandemen dan telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.<sup>15</sup>

### **3. Tujuan Dana Desa**

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju,

---

<sup>14</sup>A Saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka. 2014), h. 4

<sup>15</sup>Ibid., hlm.3

mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber kehidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.<sup>16</sup>

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

---

<sup>16</sup>Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2015) h. 54

- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>17</sup>

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes.
  - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
  - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalandengan pencapaian

---

<sup>17</sup>Ibid., hlm. 62

target RPJMDes dan RKPDes setiaptahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:<sup>18</sup>

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
  - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
  - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalandengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiaptahunnya.<sup>19</sup>

## C. PEMBERDAYAAN

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pada dasarnya agama Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti.<sup>20</sup> Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau

<sup>18</sup>Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

<sup>19</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

<sup>20</sup>Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pembangunan Masyarakat Islam: dari ideologi strategi sampai Tradisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001). Hlm. 41

keberdayaan.<sup>21</sup> Sedangkan pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata *daya* yang berarti *usaha, upaya, akal, dan kemampuan*.<sup>22</sup> Jadi pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk melakukan pengembangannya.

Pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi yaitu *Pertama*, penyadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang ditimbulkan serta kesulitan hidup atau penderitaan. *Kedua*, meningkatkan sumberdaya yang telah ditemukan, pemberdayaan memerlukan upaya advokasi kebijakan ekonomi politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah, dan tertindas tersebut terhadap sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat atau terkungkung oleh peraturan pemerintah dan pranata sosial.<sup>23</sup>

Menurut Karta Sasmita, pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya

---

<sup>21</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Reflika Aditama, 2005). Hlm. 57

<sup>22</sup>Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hlm. 317.

<sup>23</sup>M. Dewam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). 55



modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.<sup>24</sup>

Tentang masyarakat yang berdaya guna dalam kehidupannya, Allah SWT berfirman<sup>25</sup> :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya : “*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, Pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat*” (QS Ibrahim : 24-25)

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan juga bebas dari kelaparan bebas dari kebodohan, dan bebas dari kemiskinan ilmu.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan.

<sup>24</sup>Sulistiati, *Isu-isu pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*, (jakarta:balai Latihan dan Pengembangan Depsos RI, 2004), 229

<sup>25</sup>Badri Khaeruman, *Islam dan Pemberdayaan Umat* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2005), 38

- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>26</sup>

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Paul Freire pemberdayaan masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut *conscientization* yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Bertolak dari pengertian ini maka sebuah partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pelaksanaan suatu program saja melainkan menyentuh pada nilai politik.<sup>28</sup>

## 3. Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses intervensi sosial (perubahan sosial yang terencana). Adapun proses tahapan pemberdayaan menurut Isbandi Rukminto Adi, yakni<sup>29</sup> :

---

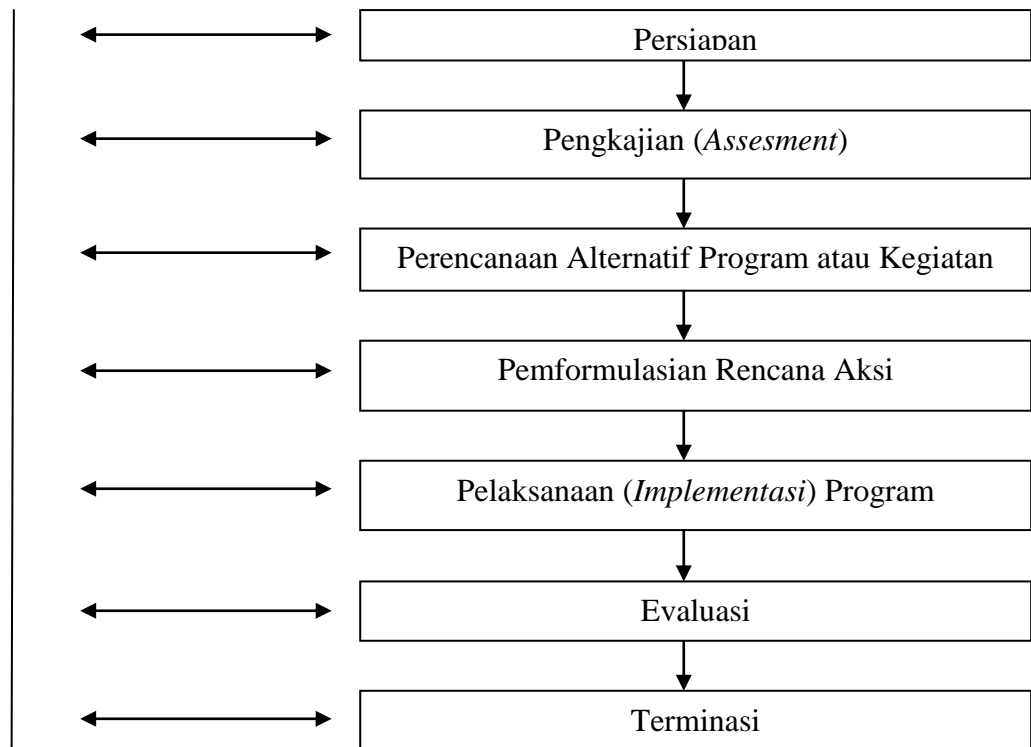
<sup>26</sup>Ibid., 229

<sup>27</sup>Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta:GavaMedia, 2004), h. 80.

<sup>28</sup>Ibid., h. 82.

<sup>29</sup>Isbandi rukminto Adi, *Pemberdayaan, pengembangan, Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), 32

Tahapan Intervensi Pemberdayaan Masyarakat (sumber : Adi, 181



Tahapan tersebut bukanlah sebuah tahapan yang kaku dan hirarkis antara satu tahap dengan tahap lainnya, melainkan tahapan yang fleksible sesuai dengan panah yang ada disebelah kiri yang menunjukkan bahwa apabila satu tahapan telah terlewati, masih membuka kemungkinan untuk kembali ke tahapan sebelumnya, penjelasan tentang tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

*Pertama* : tahap persiapan. Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (*community development*), dimana tujuan ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubahan (*agen of change*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakuka pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

*Kedua*, Tahap Assesment. Tahap pengkajian dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan kelompok sasaran sehingga menemukan kebutuhan apa yang mereka rasakan (felt needs) dan juga sumber apa yang mereka miliki.

*Ketiga*, Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan. Pada tahap ini agne perubahan (*agen of change*) secara partisipatif melibatkan warga untuk merumuskan masalah yang mereka hadapi beserta solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

*Keempat*, Tahap Pemformulasian Rencana aksi. Pada tahapan ini, peran agent of change adalah membantu sasaran untuk menuliskan program mereka dalam format yang layak untuk diajukan kepada penyandang dana.

*Kelima*, Tahap Pelaksanaan (*implementasi*) Program. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antar warga.

*Keenam*, Tahap Evaluasi. Yakni proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan warga.

*Ketujuh*, Tahap Terminasi. Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Pemutusan hubungan dengan komunitas sasaran ini sebaiknya dilakukan secara pelan-pelan, bertahap, tidak secara langsung ditinggalkan begitu saja oleh *agent of change*, sehingga

dapat dipastikan ketika agen perubahan ini keluar dari komunitas tersebut, keadaan akan jauh berubah dan komunitas sasaran sudah relatif mandiri.<sup>30</sup>

#### 4. Strategi Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang “penting” yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan. Dalam Islam, strategi pemberdayaan berarti mengembangkan sistem dari umat, oleh umat dan untuk umat.

Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu :

- a. Pemilihan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Penetapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat
- c. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Sumaryadi mengemukakan adanya lima generasi strategi pemberdayaan, yaitu *Pertama*: Generasi yang mengutamakan *relief and welfare*, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan setiap individu dan masyarakat, seperti : sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

---

<sup>30</sup>Ibid., 179-196

*Kedua: strategy community development* atau *small scale reliant local development*, yang lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan teknologi tepat-guna, dan pembangunan infrastruktur. *Ketiga* : generasi *sustainable system development*, yang lebih mengharapkan terjadinya perubahan pada tingkat regional dan nasional. *Keempat*: merupakan generasi untuk mengembangkan gerakan masyarakat (*people movement*), melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumberdaya lokal yang ada dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. *Kelima*: generasi pemberdayaan masyarakat (*empowering people*) yang memperhatikan arti penting perkembangan, teknologi persaingan, dan kerjasama.<sup>31</sup>

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat terdapat 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu<sup>32</sup> :

- a. Motivasi: dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
- b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan: peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif.
- c. Manajemen diri: setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti

---

<sup>31</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung, Alfabeta, 2013), 169-170

<sup>32</sup>Ibid., 170-171

melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, megoprasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan msyarakat.

- d. Mobilisasi sumberdaya: untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabunagn regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial.
- e. Pembangunan dan pengembangan jejaring: pengorganisasian kelompok – kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya dalam membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya.

## **5. Indikator Pemberdayaan**

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- b. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

- c. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dari indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat itu berdaya jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, mampu mensejahterakan masyarakat sekitarnya, dan mampu memenuhi ciri-ciri dari pemberdayaan yang baik. Ciri-ciri program pemberdayaan yang bersifat baik yaitu:

- a. Transparan (*transparent*): semua yang terlibat dalam proses tersebut dapat mengetahui perkembangan keuangan yang berjalan.
- b. Bertanggung jawab (*accountable*): perhitungan dana dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
- c. Menguntungkan (*profitable*): semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat khususnya keuntungan materi, baik diterima oleh pihak pelaku pemberdayaan dan juga sasaran pemberdayaan.
- d. Berlanjut (*sustainable*): proses dapat dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang.
- e. Dapat diperluas (*replicable*): program ini dapat diterapkan juga kekelompok diwilayah lainnya.<sup>33</sup>

## 6. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleran yang hakiki tadi sudah diterapkan sejak

---

<sup>33</sup>Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1999), 23



pemerintahan Rasulullah saw. Sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong-menolong (*ta'awun*) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain.<sup>34</sup> Diantara prinsip-prinsip tersebut terdapat kaitan sangat erat yang selanjutnya akan dijelaskan lebih spesifik sebagai berikut:

a. Prinsip keadilan

Kata keadilan di dalam al-Qur'an disebutkan pada urutan ketiga terbanyak dalam al-Qur'an setelah kata Allah dan 'Ilm. Hal ini menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam. Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam yang jika diartikan dengan kebebasan yang tidak terbatas.<sup>35</sup>

Keadilan sosial dalam masyarakat muslim berlaku untuk seluruh penduduk dengan berbagai agama, ras, bahasa dan warna kulit. Itulah puncak keadilan, yang tidak dicapai oleh undang undang internasional atau regular hingga sekarang. Ketika keadilan dapat diterapkan oleh setiap masyarakat muslim yang tinggal di dunia ini, maka masyarakat tidak lagi cemas untuk tidak berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih beruntung.

b. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan adalah prinsip yang berdiri di atas dasar akidah yang sama sebagai buah dari prinsip keadilan. Islam memandang tiap orang secara individu, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah

---

<sup>34</sup> Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003), 16-18.

<sup>35</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Islam*, (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2004), 80-82.

Negara. Manusia dengan segala perbedaannya semua adalah hamba Allah, tidak ada perbedaan dalam kedudukan sebagai manusia, juga dalam hak dan kewajibannya. Bahkan setiap kebutuhan dasar manusia sudah diatur secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupan.<sup>36</sup>

Dalam prinsip persamaan, tidak ada kelebihan sebagian atas yang lain dari segi asal dan penciptaan. Perbedaan hanyalah dari segi kemampuan, bakat, amal dan usaha, dan apa yang menjadi tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesi. Islam juga tidak mengukur hierarki status social sebagai perbedaan. Sebab yang membedakan adalah ukuran ketinggian derajat dari ketaqwaannya kepada Allah. Dengan demikian, semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berdaya.

c. Prinsip partisipasi

Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berkelanjutan. Prinsip partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri. Maka partisipasi sudah

---

<sup>36</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 52

ditanamkan dengan baik pada masyarakat muslim di zaman Rasulullah dan berdampak sangat baik dalam keseimbangan pemberdayaan diantara masyarakat pada saat itu.<sup>37</sup>

d. Prinsip penghargaan terhadap etos kerja

Etos ialah karakteristik dan sikap, kebiasaan serta kepercayaan, bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok manusia. Istilah ‘kerja’ mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenan Allah Swt.

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran Islam memuat spirit dan dorongan pada tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Maka dari itu kemampuan manusia itu sendirilah yang perlu diberdayakan sehingga mereka mampu mengenal diri dan posisi mereka sendiri. Sehingga akan mampu menolong diri sendiri dengan usaha sendiri.<sup>38</sup>

e. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*)

Tolong-menolong (*ta'awun*) menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah swt. Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya

<sup>37</sup> Agus Purbathin Hadi, “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan”, *Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*, 2009, 5

<sup>38</sup> Edi Suharto, Islam, “*Modal Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, disampaikan dalam Seminar “Indonesia Social Economic Outlook”*”, Dompot Dhuafa.

mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang membentuk sebuah prinsip tolong menolong.

Setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas. Berikut orang-orang yang tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada sekitarnya untuk membantunya. Melakukan injeksi dana bagi masyarakat yang kurang terberdayakan, sebagai aplikasi dari kepedulian mereka, sebagai pihak yang memiliki kelebihan terhadap mereka yang kekurangan. Mulai dari anaknya serta ahli warisnya, ataupun bila yang wajib menanggung tidak ada, maka orang yang terdekat yang mempunyai peran wajib dalam pemenuhan kebutuhannya.